

Daftar Pustaka

Australian National Audit Office. (2010). *Better Practice Guide on the Strategic and Operational Management of Assets by Public Sector Entities*.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th Edition*. California: SAGE Publications.

Datau, I. (2016). *Analisis Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Daerah Melalui Sistem Pembelian dan Sewa (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo)*. Yogyakarta: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 23/PJ/2012 tentang Pemberian Izin Penelitian (Riset) dan/atau Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak*. 25 April 2012.

Elvira, Z. (2011). *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat.

Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.

Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2012). *Qualitative Research Methods*. United Kingdom: SAGE Publications.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi ke-1 Tahun Anggaran 2015*. 5 Maret 2015.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi ke-2 Tahun Anggaran 2015*. 24 April 2015.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat*. 13 Maret 2013.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.02/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. 17 Oktober 2014.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015*. 17 Maret 2014.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*. 4 September 2007.

Kim, J. J. (2002). *Comparative Analysis Of Leasing Versus Buying General Purpose Vehicles (sedan) in The Korean Air Force*. Maret 2002.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya*.

Lubis, A. S. (2014). *Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?* Retrieved Maret 20, 2017, from <http://www.bppk.kemenkeu.go.id: http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artkel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani>

Mangkoesebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mashita, A. (2016). *Laporan Studi Kasus Implementasi Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada Tahun Anggaran 2016*. Jakarta: Magister Akuntansi - Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook*. New Delhi: SAGE Publications.

- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. 24 April 2014.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. 16 Januari 2015.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. 6 Agustus 2010.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan*. 18 Maret 2009.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 5 April 2003.
- Ritonga, I. T., & Suhartono, E. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, A. (2001). *Analisis manfaat dan Biaya Sosial*, 14.
- Sugiyono, A. (2001). *Analisis Manfaat dan Biaya Sosial*. Yogyakarta: Program Pascasarjana : Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.